

Identifikasi Pola Sebaran Permukiman Kumuh Dan Arah Penanganannya Di Kabupaten Bantaeng

Identification of Slum Distribution Patterns and Directions of Their Handling In Bantaeng District

Dewi Sartika^{1*}, Haeruddin Saleh², Iqbal Suhaeb³

¹Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng

²Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

³Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

*E-mail: dewisartika@gmail.com

Diterima: 09 September 2023/Disetujui: 30 Desember 2023

Abstrak. Beberapa dampak dari penyimpangan penggunaan lahan kawasan Pesisir antara lain, rusaknya vegetasi Pantai, munculnya genangan air, menurunnya kualitas air, berkurangnya lahan non terbangun, terjadi kepadatan dan ketidakteraturan bangunan karena terbatasnya ruang, tidak ada atau terbatasnya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurang polusi udara, aksesibilitas terbatas pada pemukiman padat penduduk, penyempitan ruang terbuka karena banyak dijadikan pemukiman, serta kurangnya prasarana untuk mendapatkan air bersih dan air minum yang layak, tidak adanya drainase yang baik dapat menyebabkan banjir pada saat musim penghujan berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu suatu konsep penataan Kawasan permukiman kumuh ditinjau dari ketersediaan prasarana, sehingga pada prosesnya dapat menyebabkan pertumbuhan dan peralihan penggunaan lahan menjadi lebih terkontrol dan dapat memberikan konsep penanganan kawasan permukiman kumuh yang ramah lingkungan dan dikembangkan sesuai dengan standar penataan kawasan pesisir yang berlaku, Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan terhadap kawasan penelitian. Maka dari itu kawasan permukiman kumuh Kelurahan Letta memiliki karakteristik yaitu; 1) Kualitas bangunan yang kurang baik dengan rentan waktu masa bangunan lebih dari 20 tahun. Dengan status kepemilikan berupa hak milik dan hak sewa. 2) Kepadatan bangunan tinggi dengan rata-rata material bangunan batu dan seng serta jaringan drainase yang belum cukup tersedia. 3) Dari segi pelayanan fasilitas sarana dan prasarana masih sangat buruk. Diakibatkan kualitas bangunan serta sistem pelayanan sarana dan prasarana yang masih kurang.

Kata Kunci : Pola Sebaran, Permukiman Kumuh, Arah Penanganan Kumuh, Bantaeng

Abstract. Some of the impacts of land use irregularities in the Coastal area include the destruction of coastal vegetation, the emergence of puddles, decreased water quality, reduced non-built land, building density and irregularities due to limited space, no or limited green open space as a rain catchment area and air pollution reduction, limited accessibility in densely populated settlements, narrowing open space because many are used as settlements, and lack of infrastructure to obtain clean water and proper drinking water, The absence of good drainage can cause flooding during the rainy season based on the above, it is necessary to have a concept of structuring the slum area in terms of the availability of infrastructure, so that in the process it can cause growth and land use change to be more controlled and can provide a concept of handling slum areas that are environmentally friendly and developed in accordance with applicable coastal area planning standards, This research uses a qualitative descriptive approach. Based on the identification results that have been carried out on the research area. Therefore, the slum area of Letta Village has characteristics, namely; 1) Poor building quality with a vulnerable building mass of more than 20 years. With ownership status in the form of property rights and lease rights. 2) High building density with an average building material of stone and zinc and a drainage network that is not sufficiently available. 3) In terms of service facilities and infrastructure are still very poor. Due to the quality of the building and the service system of facilities and infrastructure that is still lacking.

Keywords: Distribution Pattern, Slum Settlement, Slum Management Direction, Bantaeng



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Perkembangan penduduk kota – kota di Indonesia baik sebagai pertumbuhan penduduk maupun akibat urbanisasi telah memberikan indikasi adanya masalah perkotaan yang serius, diantaranya tumbuh kawasan permukiman kumuh. Permukiman kumuh memiliki pengertian permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan tinggi, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Karakteristik perumahan dan permukiman kumuh adalah satuan entitas perumahan dan permukiman yang mengalami degradasi kualitas, kondisi bangunan memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur, tidak memenuhi syarat serta kondisi sarana prasarana keciptakaryaannya (jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, proteksi kebakaran) yang tidak memenuhi syarat (KemenPUPR 2018).

Urbanisasi yang dilakukan penduduk desa ke kota menyebabkan terjadinya penumpukan penduduk di kota dengan harapan terjadinya perbaikan perekonomian menyebabkan urbanisasi terus terjadi. Namun, kurangnya skill dan Pendidikan dari penduduk desa menyebabkan mereka kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga mereka tidak mampu untuk memiliki kehidupan yang layak. Salah satu bentuk akibat dari bertambahnya jumlah penduduk di kota adalah terbentuknya pemukiman kumuh. (Pigawati & Nursyahbani, 2015)

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. (UU No. 1 Tahun 2011)

RPJMN 2020-2021 telah mengutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia kedepan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) antara lain : 1) Tanpa Kemiskinan, 2). Tanpa Kelaparan, 3). Kehidupan sehat dan sejahtera, 4) Pendidikan berkualitas, 5) Kesetaraan Gender, 6). Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7). Energi Bersih dan Terjangkau, 8). Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9). Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 10). Berkurangnya kesenjangan, 11). Kota dan Permukiman Berkelanjutan, 12). Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, 13). Penanganan Perubahan Iklim, 14). Ekosistem Lautan, 15). Ekosistem Daratan, 16). Perdamaian, dan kelenbagaan yang tangguh dan 17). Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

Beberapa dampak dari penyimpangan penggunaan lahan kawasan Pesisir antara lain, rusaknya vegetasi Pantai, munculnya genangan air, menurunnya kualitas air, berkurangnya lahan non terbangun, terjadi kepadatan dan ketidakteraturan bangunan karena terbatasnya ruang, tidak ada atau terbatasnya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurang polusi udara, aksesibilitas terbatas pada pemukiman padat penduduk, penyempitan ruang terbuka karena banyak dijadikan pemukiman, serta kurangnya prasarana untuk mendapatkan air bersih dan air minum yang layak, tidak adanya drainase yang baik dapat menyebabkan banjir pada saat musim penghujan berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu suatu konsep penataan Kawasan permukiman kumuh ditinjau dari ketersediaan prasarana, sehingga pada prosesnya dapat menyebabkan pertumbuhan dan peralihan penggunaan lahan menjadi lebih terkontrol dan dapat memberikan konsep penanganan kawasan permukiman kumuh yang ramah lingkungan dan dikembangkan sesuai dengan standar penataan kawasan pesisir yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif . Moleong (2005) menyatakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata- kata, gambar-gambar dan bukan angka. Penelitian yang mengutamakan kualitas data, dengan mengkaji dan menganalisis kondisi dan situasi yang berhubungan pemukiman kumuh. Lokasi penelitian ini pada Kabupaten Bantaeng yang dibatasi pada Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng.

Populasi dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kontribusi besar dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penduduk di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Jumlah sampel pada permukiman adalah 100 sampel, dengan tingkat kesalahan sebesar 10 %..

Hasil dan Pembahasan

a. Identifikasi Kondisi Eksisting Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Letta

Permasalahan permukiman kumuh perkotaan sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup kompleks, baik dari sisi fisik/lingkungan, ekonomi, sosial, serta sarana dan prasarananya. Determinan Faktor dalam konteks penanganan kawasan permukiman kumuh sangat signifikan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam prosesnya kemudian berdampak pada kondisi kawasan perkotaan secara umum dan diidentifikasi akan memerlukan penanganan dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Secara khusus dampak perkembangan permukiman kumuh perkotaan berimplikasi terhadap

paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan dan penghidupan warganya. Pada sisi yang lain khususnya terkait dengan tatanan sosial budaya masyarakat, dan komunitas yang bermukim pada lingkungan permukiman kumuh, mengindikasikan bahwa secara ekonomi termasuk kategori masyarakat ekonomi lemah dan berpenghasilan rendah, yang merekonstruksi penyebab terjadinya degradasi tatanan kehidupan masyarakat, baik pada tingkat struktur sosial, sistem sosial, dinamika sosial, pola kultural, konflik sosial dan fenomena urban crime.

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang juga mengalami permasalahan permukiman kumuh akibat rendahnya tingkat perekonomian, budaya masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan permukiman serta terbatasnya ketersediaan lahan untuk permukiman. Adapun beberapa isu strategi permukiman kumuh di Kabupaten Bantaeng adalah sebagian besar sarana infrastruktur pada sector limbah belum terkelolah

dengan baik, hanya 69 % jumlah KK yang memiliki jamban sehat, limbah rumah tangga (grey water) yang dihasilkan sebagian besar yaitu 65 % rumah tangga tidak memiliki akses saluran septic tank, dimana masyarakat urban yang tinggal disepanjang bantaran sungai lebih banyak membuang limbah cair rumah tangga mereka ke sungai. Hal ini dipicu oleh adanya permasalahan ekonomi maupun tidak tersedianya lahan, jika permukiman kumuh ini tidak segera dikendalikan maka akan memberikan dampak menjamurnya kantong-kantong permukiman kumuh yang tidak teratur dan tidak terkendali, peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, peningkatan potensi kerawanan dan konflik social, penurunan tingkat kesehatan masyarakat dan penurunan kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman.

Kelurahan Letta merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Banteng Kelurahan Letta berada di pusat kota dan berjarak 2 km dari ibukota Kecamatan Bantaeng. Adapun luas wilayah Kelurahan Letta adalah 16,8 Ha yang terbagi dalam:

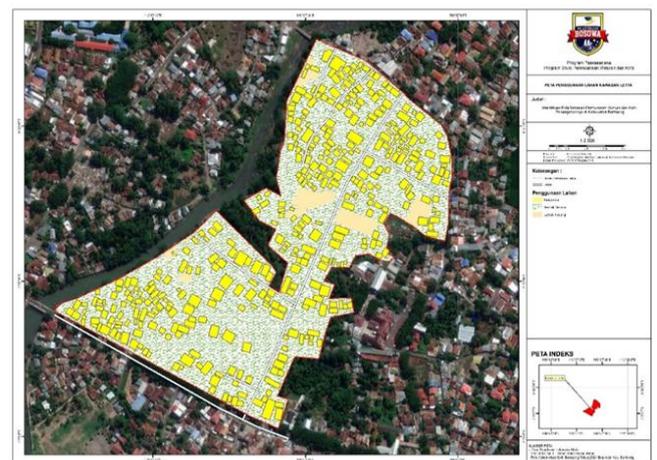
Tabel 1. Luas Lokasi Pemukiman Kumuh Kelurahan Letta

Nama Lokasi (Kawasan)	Luas (Ha)	RT/RW	Kelurahan	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)
Sungai Cilendu II	1.4	RT001-RW002	Letta	164
	3.23	RT001-RW004	Letta	48
	2.57	RT001-RW005	Letta	53
	2.32	RT002-RW001	Letta	54
	1.86	RT002-RW002	Letta	134
	1.5	RT002-RW004	Letta	140
	2.58	RT002-RW005	Letta	12
	1.85	RT003-RW001	Letta	29
	1.71	RT003-RW002	Letta	39
Total Luas Kawasan	19.02			619

Sumber : Survey Lapangan Tahun 2023

Dari Table 1. diatas dapat dilihat bahwa RT001-RW004 Kelurahan Letta merupakan lokasi terbesar yaitu 3,2 Ha dan RT002-RW004 luas terkecil yaitu 1,5 Ha.

Kelurahan Letta, memiliki kondisi daerah yang datarannya datar dan berada di atas ketinggian kurang lebih 200 meter dari permukaan air laut. Kondisi tanah di Kelurahan Letta cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman baik tanaman hortikultura maupun tanaman jangka panjang. Masyarakat Kelurahan Letta, adalah mayoritas petani dan jenis pekerjaan pokok yang paling banyak di pada 3 kelurahan tersebut adalah petani dengan jumlah 913 Kepala Rumah Tangga 59.1%, masyarakat yang bergerak di bidang pertanian dan pertambangan (tambang galian C) ada yang bersatus sebagai pemilik, penggarap dan ada juga hanya sebagai buruh. Penggarap (Patesang) merupakan kegiatan pertanian dan pertambangan. Kondisi penggunaan lahan Kelurahan Letta dapat dilihat pada Gambar 1. berikut:



Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Kawasan Letta

Berdasarkan peta diatas dapat dilihat bahwa luas untuk pemukiman 4,14 Ha, Lahan kosong 0,58 Ha dan semak belukar 10.69 Ha sehingga total keseluruhan 15.42 Ha.

b. Kondisi Fisik Bangunan Permukiman Kumuh Kelurahan Letta

Dari hasil identifikasi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Letta dengan kekumuhan kategori sedang dan kategori berat. Karakteristik fisik bangunan dijelaskan sebagai berikut:

a) Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan

Dalam pemanfaatan lahan dalam suatu wilayah atau kawasan perlu adanya legalitas terkait status kepemilikan lahan. Dari pengertian tersebut maka permukiman kumuh juga dilakukan peninjauan salah satunya berdasarkan legalitas kepemilikan tanah. Pengklasifikasian legalitas kepemilikan tanah didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 yang mengkategorikan kepemilikan tanah ke dalam 4 dari 7 kategori utama yaitu hak milik, girik, hak sewa, Hak Guna Bangunan (HGB). Untuk mengetahui lebih jelas tentang legalitas kepemilikan tanah pada permukiman kumuh di Kelurahan Letta Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kondisi Status Kepemilikan Lahan di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan

No	Status Kepemilikan Lahan	Jumlah	Persentase
1	Girik	3	3 %
2	Hak Milik	74	74 %
3	Hak Sewa	23	23%
Jumlah		100	100

Sumber : Hasil Kuisioner Tahun 2023

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner pada Table 2. diatas, legalitas kepemilikan tanah yang dijumpai di wilayah penelitian terdiri dari girik, hak milik, hak sewa. Sebanyak 3 responden memiliki rumah dengan status girik, 74 responden memiliki rumah dengan status hak milik, dan 23 responden memiliki rumah dengan status hak sewa.

b) Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Kualitas Bangunan

Karakteristik fisik bangunan pada permukiman kumuh di Kelurahan Letta dinilai dari jenis material bangunan yang digunakan pada atap, dinding serta lantai bangunan. Untuk material atap bangunan permukiman kumuh dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kondisi Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Atap

No	Material Atap	Jumlah	Persentase
1	Genteng	22	22 %
2	Seng	78	78 %
Jumlah		100	100

Sumber: Hasil Kuisioner Tahun 2023

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner pada table diatas berdasarkan material atap seperti genteng dan seng, sebanyak 78 unit rumah responden memiliki atap seng atau sekitar 78% dan 22 unit rumah responden memiliki atap genteng atau 22 % dari total jumlah responden.

Dari hasil observasi juga terlihat material atap berupa seng dengan kondisi pada beberapa rumah mengalami kebocoran diakibatkan kerusakan seperti berlubang disebabkan umur material yang sudah cukup lama dan mengalami korosi diakibatkan air hujan.

c) Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Jarak Antar Bangunan

Karakteristik fisik bangunan pada permukiman kumuh di Kelurahan Letta kabupaten Bantaeng. Berdasarkan dari jarak antar bangunan dengan bangunan lainnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Jarak Antar Bangunan

No	Jarak Antar Rumah	Jumlah	Persentase
1	≤ 1 Meter	48	48 %
2	1 - 2 Meter	31	31 %
3	3 – 4 Meter	17	17 %
4	≥ 5 Meter	4	4 %
Jumlah		100	100

Sebanyak 48 responden memiliki rumah dengan jarak bangunan ≤ 1 Meter sementara 31 responden memiliki rumah dengan jarak bangunan 1 - 2 Meter, 17 responden memiliki rumah dengan jarak bangunan 3 – 4 Meter dan 4 responden memiliki rumah dengan jarak bangunan ≥ 5 Meter.

Permasalahan pembangunan rumah yang terdapat di Kelurahan Letta yaitu Ketidakteraturan bangunan permukiman warga setempat hal ini terjadi dikarenakan kurangnya wawasan masyarakat mengenai aturan pendirian bangunan dan kondisi lahan. Akibat dari ketidakteraturannya bangunan ini menyebabkan kawasan tersebut menjadi kumuh.

c. Kondisi Sarana & Prasarana Permukiman Kumuh di Kelurahan Letta Kabupaten Bantaeng

Analisa identifikasi karakteristik fisik sarana digunakan untuk mengetahui pelayanan fasilitas terhadap penduduk di kawasan permukiman kumuh terhadap sarana umum yang ada. Sarana fasilitas umum yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan perdagangan jasa. Kondisi fisik sarana umum dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu:

- 1) Kategori Baik: Jenis fasilitas umum telah terlayani, kondisi fisik bangunan fasilitas telah layak dan fasilitas telah memenuhi pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk.
- 2) Kategori Cukup: Jenis fasilitas umum telah terlayani, kondisi dari segi fisik bangunan fasilitas kurang layak dan fasilitas telah memenuhi pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk.
- 3) Kategori Kurang: Jenis fasilitas umum belum tersedia dan kondisi fasilitas kurang memenuhi pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk.

a) Kondisi Jaringan Jalan

Kondisi jaringan jalan yang ada di Kelurahan Letta yaitu tanah dan paving, sebagian jalan tidak dilengkapi dengan adanya drainase. Hal ini di karenakan usia jalan yang sudah lama dan belum adanya perbaikan jalan dan belum ada perencanaan pembangunan saluran drainase di samping kanan kiri jalan mengakibatkan becek dan tergenang air hujan, air saluran yang berasal dari rumah warga juga ada yang menggenangi jalanan, sehingga tidak nyaman untuk dilalui.

Jalan tersebut hanya bisa dilalui oleh sepeda motor, sepeda, dan pejalan kaki. Sebagian besar, jalan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Letta sudah diperkeras dengan paving. Akan tetapi juga terdapat jalan yang telah diperkeras namun mengalami kerusakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5. Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Jarak Antar Bangunan

No	Kondisi Jaringan Jalan	Jumlah	Persentase
1	Tanah	24	24 %
2	Paving	76	76 %
Jumlah		100	100

Sumber : Hasil Kuisioner Tahun 2023

Berdasarkan rekapitulasi kuisioner pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa 76 responden (76 %) mengatakan bahwa kondisi jalan menurut jenis perkerasan paving yang menuju kerumahnya memiliki kualitas yang baik. Sementara 24 responden (24%) menilai kondisinya buruk karena masih tanah. Kondisi jalan lingkungan tentu mempengaruhi tingkat aksesibilitas atau kemudahan dalam mencapai lokasi lain. Adapun aksesibilitas di Kelurahan Letta sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan karena jaringan jalan yang terdapat di kawasan ini hanya berupa jalan lingkungan dan ganggang sempit dengan lebar kurang dari 2 meter.

Dari hasil observasi juga terlihat material perkerasan jalan menggunakan paving yang masuk dalam kawasan permukiman kumuh. Dimana perkerasan berupa paving tersebut hasil dari program pemerintah Kabupaten Bantaeng terkait perbaikan lingkungan kawasan permukiman kumuh tahun 2020.

b) Kondisi Jaringan Drainase

Kondisi drainase lingkungan, kontruksi drainase yang buruk dan belum permanen mengakibatkan pendangkalan

dan di penuh tumpukan sampah. Hal ini di sebabkan oleh kurangnya pemeliharaan, ketidak mampuan drainase menampung air hujan dan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Kondisi ini mengakibatkan sampah meluap dari drainase dan menyebabkan bau yang tidak sedap, dan menjadi sumber penyakit.

Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

c) Kondisi Jaringan Air Bersih

Kondisi penyediaan air minum, sumber air berasal dari PDAM, sumur galian, warga sekitar menggunakan pipa plastik yang tidak permanen untuk menyambungkan air, hal ini cukup memudahkan untuk perbaikan pada kawasan tersebut.

d) Kondisi Jaringan Persampahan

Kondisi pengelolaan sampah. kurangnya penangkalan sampah, masyarakat menumpuk sampah di drainase atau membakarnya. Hal ini di sebabkan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar terkait sampah. Kondisi ini menyebabkan lingkungan terkesan kumuh.

Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

d. Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala Prioritas Penanganan

Untuk menilai lokasi permukiman maka dilakukan penilaian lokasi berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018. Dari hasil penilaian terhadap kompleksitas permasalahan, kemudian dibuatkan klasifikasi untuk mendapatkan daftar urutan (ranking) atau skala prioritas penanganan sehingga dapat ditetapkan strategi dan pola penanganannya. Adapun hasil penilaian skoring kekumuhan Kabupaten

Bantaeng berdasarkan kriteria dan indikator serta parameter kekumuhan, tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Tingkat Kumuh Kelurahan Letta

Nama Lokasi (Kawasan)	Luas (Ha)	RT/RW	Nilai Kumuh Awal	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)	Tingkat Kumuh
Sungai Cilendu II	1.4	RT001-RW002	36	164	Kumuh Ringan
	3.23	RT001-RW004	18	48	Kumuh Ringan
	2.57	RT001-RW005	30	53	Kumuh Ringan
	2.32	RT002-RW001	8	54	Tidak Kumuh
	1.86	RT002-RW002	20	134	Kumuh Ringan
	1.5	RT002-RW004	25	140	Kumuh Ringan
	2.58	RT002-RW005	44	12	Kumuh Sedang
	1.85	RT003-RW001	19	29	Kumuh Ringan
	1.71	RT003-RW002	35	39	Kumuh Ringan
	Total Luas Kawasan	19.02			619

Sumber : Survey Lapangan dan Hasil Analisis Tahun 2023

e. Merumuskan Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Letta Kabupaten Bantaeng

Proses analisis ini pada dasarnya merupakan proses analisis deskriptif kualitatif analisis deskriptif kualitatif adalah serangkaian kajian yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan rumus melainkan dengan kata-kata dan kalimat menurut data pengambilan kesimpulan (Sugiyono,2006) Untuk menghasilkan arahan umum yang relevan tetapi dapat bersifat lebih spesifik maka diperlukan suatu validasi arahan. Arahan umum yang relevan divalidasi dengan tiga acuan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat validasi arahan, akan tetapi juga berfungsi memperkaya/masukan terkait arahan umum yang sudah dirumuskan sebelumnya. Adapun tiga acuan untuk memvalidasi sekaligus memberi masukan untuk memperkaya arahan umum dengan adanya arahan rinci yang relevan di wilayah penelitian antara lain :

- a) Teori atau peraturan yang berkaitan dengan faktor-faktor berpengaruh terhadap pengembangan di wilayah penelitian.
- b) Penerapan (*Best Practice*) di lokasi lain terkait factor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan di wilayah penelitian.
- c) Kebijakan-kebijakan yang mengatur terkait pengembangan di wilayah penelitian.

Dalam perumusan arahan penanganan dilakukan penentuan tingkat prioritas yang diperoleh dari hasil analisa AHP yang telah dilakukan. Penentuan arahan disesuaikan dengan agenda program permukiman berkelanjutan 100-0-100 Tahun 2015-2019 oleh Kementerian PU Direktorat Jendral Cipta Karya. Dimana faktor dan variabel penyebab kumuh dengan nilai bobot paling besar akan memiliki tingkatan prioritas utama.

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kawasan permukiman kumuh Kelurahan Letta memiliki karakteristik berupa kualitas bangunan yang kurang baik dengan rentan waktu masa bangunan lebih dari 20 tahun. Dengan satatus kepemilikan berupa hak milik dan hak sewa, kepadatan bangunan tinggi dengan rata-rata material bangunan batu dan seng serta jaringan drainase yang belum cukup tersedia dan segi pelayanan fasilitas sarana dan prasarana masih sangat buruk. Diakibatkan kualitas bangunan serta sistem pelayanan sarana dan prasarana yang masih kurang

Daftar Pustaka

- Abil, A., Latief, R., & Yahya, I. (2020). Strategi Pengendalian Perkembangan Permukiman Disepanjang Sungai Tallo Kelurahan Rapokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Journal of Urban Planning Studies*, 1(1), 098-104
- Abidin, Slamet Moh Suyono, 1991, *Fiqih Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia.

- Frenzel, Anne C., Pekrun, Reinhard., and Goetz,Thomas. (2007). Perceived learning environment and students' emotional experiences: A multilevel analysis of mathematics classrooms. *Learning and Instruction* 17 (2007) 478e493. doi:10.1016/j.learninstruc.2007.09.001.
- Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan. (2018). Surat Edaran Menteri PUPR 02/SE/M/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil.
- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
- Nursyahbani Raisya, Bitta Pigawati. 2015. *Kajian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Kampung Kota*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Jakarta: Kementrian PUPR, 2016.
- Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Rahayu, R., Syafri, S., Salim Rasyidi, E., & Abbas, J. (2023). Strategi Penangan Permukiman di Kabupaten Jeneponto: studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kawasan Allu Kecamatan Bangkala. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(2), 148-153.